



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jalan Gajah Mada No. 90 Telepon (0374) 42443 Fax (0374)*



**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI**  
**PEMERINTAH**  
**( LKIP )**

**TAHUN 2018**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	4
1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah .....	10
2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 .....	10
2.3. Rencana Kinerja Tahunan .....	11
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2014 .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
3.2. Realisasi Anggaran .....	17
BAB IV PENUTUP .....	21
4.1. Kesimpulan .....	21
4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah .....	22
LAMPIRAN	




## KATA PENGANTAR


**P**uji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu laporan yang akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah direncanakan selama 1 Tahun Anggaran berjalan. Menyadari hal itu maka penyusunannya senantiasa melibatkan setiap level organisasi/bidang yang ada dan hasilnya telah disosialisasikan kepada masing-masing bidang sebagai penanggung jawab dari kegiatan yang ada maupun unsur organisasi lainnya guna mendapat masukan agar keberhasilan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2018 dapat dicapai secara maksimal.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima di masa mendatang.

Bima, 14 Januari 2019  
Kepala Dinas Kominfo  
Kota Bima,  
  
**Ir. Supawarman**  
NIP. 19630506 199203 1 012



# PENDAHULUAN

## BAB

### I

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Diskominfo dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKIP Diskominfo Kota Bima Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

### 1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bima,

Tugas :

Membantu Kepala Daerah dalam hal kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan desiminasi informatika, pengelolaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) dan persandian serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a) Pengoordinasian Pembinaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik bagi badan-badan publik instansi Pemerintah Daerah;
- b) Pengoordinasian Strategi Pengembangan Pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), Smart City dan GCIO (Government Chief Information Office) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- c) Pengoordinasian pembangunan jaringan komunikasi/telekomunikasi dan pengamanan akses informasi guna memfasilitasi hubungan komunikasi antara SKPD Lingkup Pemerintah Daerah.
- d) Pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Program Pelayanan administrasi perijinan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;
- e) Penyelenggaraan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;
- f) Pengoordinasian pembinaan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan);
- g) Pengoordinasian dan pembinaan Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi serta sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- h) Sebagai ketua harian PPID dan mengoordinasikan pembinaan PPID di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
- i) Penyelenggara pusat data terintegrasi lingkup Pemerintah Daerah dan infrastruktur pendukungnya.
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan Fungsinya

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi





yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi *stakeholders*. Disamping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dituntut untuk dapat mewujudkan *Smart City dan E-Governance* atau *Kepemerintahan yang baik*. Pengertian *Kepemerintahan yang baik (good governance)*, dapat diidentifikasi dengan indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :

- *Participation* ; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- *Rule of law* ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- *Transparancy* ; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
- *Responsive* ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake holders.
- *Consensus Orientation* ; *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- *Equity* ; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- *Effectiveness and effeciency* ; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- *Accountability* ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

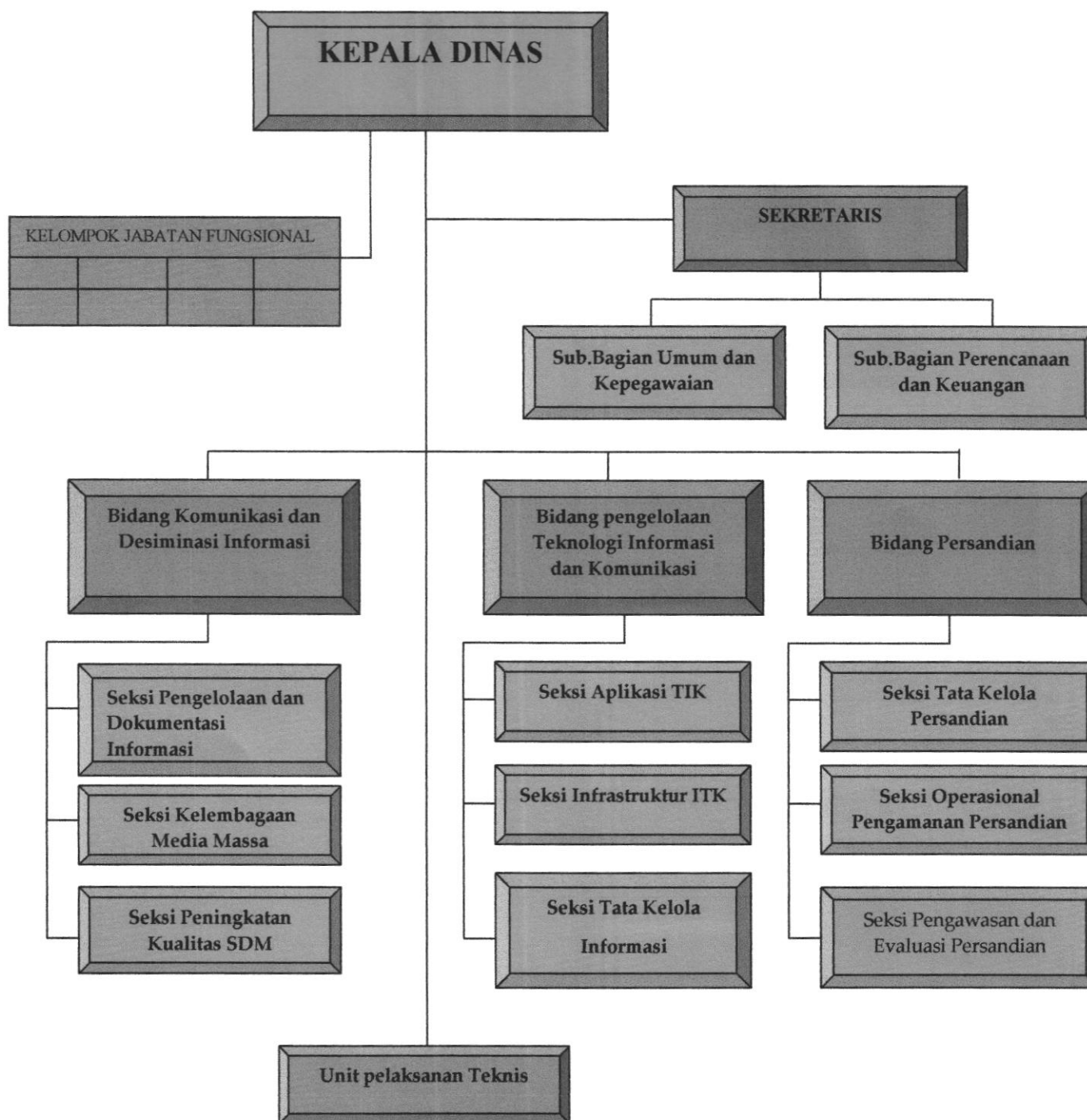
*Strategic vision* ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini

### 1.2.2 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mempunyai Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 51

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BIMA**



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai yaitu 36 personil dengan tingkat pendidikan :

1. S-2 : 4 orang
2. S-1 : 17 orang
3. D-3 / Sarmud : 0 orang
4. SLTA : 6 orang

Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Keadaan Personil**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima**  
**( Desember 2017 )**

NO.	ESELON	GOLONGAN (Orang)				STRATA PENDIDIKAN			
		IV	III	II	I	SLTA	DIII	S-1	S-2
1.	II	1	-	-	-	-	-	1	-
2.	III	3	1	-	-	-	-	2	2
3.	IV	-	11	-	-	4	-	5	2
4.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Staf	-	9	2	-	2	-	9	-
<b>JUMLAH</b>		4	21	2	-	6	-	17	4

Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah sebagai berikut :

- Eselon II/b : 1 jabatan
- Eselon III/a : 1 jabatan
- Eselon III/b : 3 jabatan

- Eselon IV/a : 11 jabatan

Gambaran tentang jabatan/eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel .2.  
SDM Berdasarkan Eselonisasi**

NO.	GOL./RUANG	ESELON					
		IV-b	IV-a	III-b	III-a	II-b	II-a
1.	IVc	1	-	-	-	-	-
2.	IVb	-	-	1	1	-	-
3.	IVa	-	-	1	-	-	-
4.	III d	-	3	1	-	-	-
5.	IIIc	-	8	-	-	-	-
6.	IIIb	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		1	11	3	1	-	-

### 1.3. Isu Startegis dan Permasalahan yang Dihadapi

Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi, dan media, dan teknologi, Diskominfo Kota Bima dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan di dalam Renstra 2017-2018, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Bima. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu
- Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi.

- Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Mewujudkan Bima Smart City

<h1>PERENCANAAN KINERJA</h1>	<h2>BAB</h2>
	<h2>II</h2>

### 2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
				2014	2017	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	-	-	-	60%	100%
			Prosentase Pengelolaan Website di pemerintahan pada Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	-	-	-	60%	90%
2		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif	-	-	-	8 titik	14 Titik
3		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	-	-	-	60%	90%
			Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-	-	100%	100%

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2013-2018

## 2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) Tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel4. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	jumlah Aplikasi/Jumlah SKPD x 100%
		Prosentase Pengelolaan Website di pemerintahan pada Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	SKPD yang memiliki Website/Jumlah SKPD x 100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif	14 titik
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	Jumlah yang ditangani/jumlah aduan x 100%
		Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik (KIP)	jumlah SKPD yang melakukan Update Informasi/Jumlah Website SKPD x 100%



### 2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Tahun 2018.

Tabel5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	100%
		Prosentase Pengelolaan Website di pemerintahan pada Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif	14 Titik
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%
		Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik (KIP)	100%

### 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a) sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah lembar/dokumen Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018 yang format penyusunannya masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018 dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut, dirumuskan sejumlah program/ kegiatan utama dengan dukungan penganggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pada Bulan Januari 2018, telah diperjanjikan 12 program utama yang terinci ke dalam 40 kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima; dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 5.170.000.000,00. Selanjutnya pada Bulan September 2018, dengan adanya perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.770.000.000,00.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan dengan pengukuran kinerja yang membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Selanjutnya, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan pencapaian Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.

#### PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2013-2018 bahwa tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik yang diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis IT yang bertujuan menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi serta mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik , pada akhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2013-2018 perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan tersebut tercapai atau tidak.

## Sasaran Strategis I

### Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis I disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	38 SKPD	38 SKPD	100%
	Prosentase Pengelolaan Website di pemerintahan pada Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	38 SKPD	38 SKPD	100%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif	14 titik	14 titik	100%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	38 SKPD	34 SKPD	90 %
	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik (KIP)	10 SKPD	10 SKPD	100%

Indikator kinerja Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2013-2018, dimana Tahun 2018 merupakan tahun terakhir perencanaannya. Berikut tampilan beberapa Website OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima yang sudah berjalan.

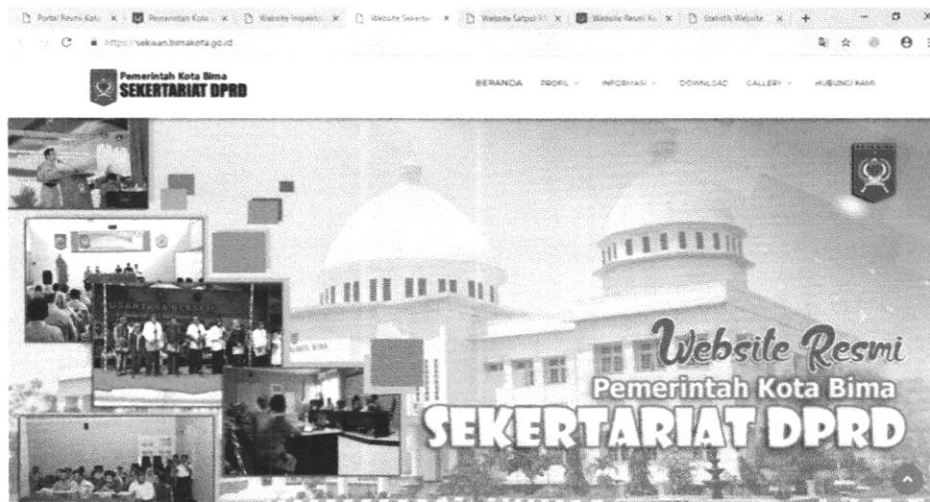
#### Tampilan Muka Website Portal Pemerintah Kota Bima



Tampilan Muka Website Inspektorat Kota Bima



Tampilan Muka Website Sekretariat DPRD Kota Bima



Tampilan Muka Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima



Namun demikian, perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis antara tahun 2017 dan Tahun 2018 tetap dapat dilakukan dengan menyandingkan beberapa indikator kinerja yang saling berkaitan.

Tabel8. Perbandingan Realisasi Kinerja Diskominfo dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	38 SKPD	8 SKPD	21%	38 SKPD	38 SKPD	100%
Prosentase Pengelolaan Website di pemerintahan pada Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	38 SKPD	8 SKPD	21%	38 SKPD	38 SKPD	100%
Fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif	12 titik	8 titik	80%	14 titik	14 titik	100%
Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	12 SKPD	8 SKPD	60 %	38 SKPD	34 SKPD	90 %
Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik (KIP)	8 SKPD	8 SKPD	100%	10 SKPD	10 SKPD	100%

Pengukuran kinerja pun merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima. Dalam hal ini akan tergambar capaian target jangka menengah Diskominfo yang terealisasi hingga Tahun 2018.

Tabel9. Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	38 SKPD	38 SKPD	100%
	Prosentase Pengelolaan Website di pemerintahan pada Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	38 SKPD	38 SKPD	100%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif	14 titik	14 titik	100%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	38 SKPD	34 SKPD	90 %
	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik (KIP)	10 SKPD	10 SKPD	100%

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis selama Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatan utama yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan pokok.

Tabel10. Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Jumlah Anggaran (Rp.)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah	422.166.700,00
	Pengembangan/Pembenahan Aplikasi Web	704.660.400,00
	Perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	103.980.000,00

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja Diskominfo 2018



Penentuan program/ kegiatan utama yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Diskominfo yang bertanggung jawab terhadap kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan desiminasi informatika, pengelolaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) dan persandian serta tugas pembantuan.

Tabel 14. Capaian Kinerja Rata-Rata Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Rata-Rata
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	99,02 %
<b>Total Capaian Kinerja Rata-Rata (%)</b>		<b>99,02 %</b>

Selama Tahun 2018, telah ditetapkan sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima. sasaran strategis tersebut berhasil dicapai dengan tingkat capaian rata-rata 99.02%, .

Kekurangan dari hasil capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan kurang efektif, antara lain : (1) kurang tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) kurang tersedianya anggaran yang cukup.

## 3.2. Realisasi Anggaran

### 3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Selama Tahun Anggaran 2018, kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.692.769.918,96 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 6.546.406.799,00 atau sebesar 97,81 %. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.922.769.918,96 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mampu merealisasikan

sebesar Rp. 1.858.523.030,00 atau sebesar 96,66%. Adapun terkait belanja langsung, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.770.000.000,00 telah mampu direalisasikan sebesar Rp. 4.687.883.769,00 atau sebesar 98,28 %. Dengan demikian, presentase realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima terdiri dari 97,81 % belanja tidak langsung dan 98,28 % belanja langsung.

Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel15. Rekapitulasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	1.922.769.918,96	1.858.523.030,00	96,66
2	Belanja Langsung	4.770.000.000,00	4.687.883.769,00	98,28
Jumlah		6.692.769.918,96	6.546.406.799,00	97,81

### 3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima melaksanakan 2 (Dua) Program Utama dan 14 (empat belas) kegiatan Utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel16. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Utama	Target(Rp.)	Realisasi(Rp.)	%
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Pelaksanaan PPID Utama	Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah	422.166.700,00	419.879.900	99,46
		Pemeliharaan Perangkat Aplikasi Website	Pengembangan/Pembenahan Aplikasi Web	704.660.400,00	683.442.183	96,99
		Regulasi Pengamanan informasi Pemerintah	Perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	103.980.000,00	102.257.700	98,34
Jumlah				1.230.807.100,00	1.205.579.783	97,95

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2018, pagu anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah sebesar Rp. 1.230.807.100,00 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 1.205.579.783 atau sebesar 97,95%.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel17. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018

PROGRAM	KEGIATAN	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang)	%
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>2.113.653.200</b>	<b>2.085.087.248</b>	<b>28.565.952</b>	<b>98,65%</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	217.800.000	208.484.000	9.306.000	96,19%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	738.000.000	725.890.378	12.109.622	98,38%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000	453.000	1.047.000	30,20%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.200.000	50.800.000	1.400.000	97,32%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.019.000	37.083.000	3.928.000	90,43%
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000	19.920.000	80.000	99,60%
	Penyediaan alat tulis kantor	82.578.400	82.584.800	11.600	99,99%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.950.000	89.905.000	45.000	99,95%
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor	10.382.000	10.352.100	9.900	99,90%
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	127.500.000	127.290.000	210.000	99,84%
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	217.800.000	217.740.000	60.000	99,97%
	Penyediaan makanan dan minuman	60.500.000	60.450.000	50.000	99,92%
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	404.445.800	403.229.970	1.215.830	99,70%
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50.000.000	48.905.000	95.000	99,81%
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>138.336.000</b>	<b>137.829.000</b>	<b>518.000</b>	<b>99,63%</b>
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	31.050.000	31.050.000	-	100,00%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	63.750.000	63.740.000	10.000	99,98%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.536.000	43.030.000	506.000	98,84%
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>28.150.000</b>	<b>28.150.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapan	28.150.000	28.150.000	-	100,00%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>168.258.000</b>	<b>168.258.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lictisar realisasi kinerja SKPD	14.300.000	14.300.000	-	100,00%
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	24.700.000	24.700.000	-	100,00%
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	14.100.000	14.100.000	-	100,00%
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	24.700.000	24.700.000	-	100,00%
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	54.150.000	54.150.000	-	100,00%
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	28.300.000	28.300.000	-	100,00%
<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan</b>		<b>150.850.000,00</b>	<b>145.247.248</b>	<b>5.402.752</b>	<b>96,41%</b>
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	150.850.000	145.247.248	5.402.752	96,41%

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018 memiliki nilai strategis karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2018 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dan Renstra Diskominfo Tahun 2013-2018.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama Tahun 2018.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Tahun 2018 semuanya telah direalisasikan dengan baik kategori Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 97,95%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 97,90%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen

penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Komunikasi dan Infromasi pada Tahun 2018 telah berjalan dengan baik.

#### **4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah**

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Diskominfo melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah permasalahan dan kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, secara umum organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima perlu memperkuat peran kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses perencanaan kepegawaian daerah yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya:

1. Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang dan evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang baik.

1. Untuk menilai keberhasilan suatu program, perlu dilakukan evaluasi yang berdasarkan data dan informasi yang akurat dan obyektif. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang sistematis dan terencana.

2. Untuk mengetahui seberapa jauh tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran yang sistematis dan terencana. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diharapkan.

3. Untuk mengetahui seberapa jauh tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran yang sistematis dan terencana. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diharapkan.

4. Untuk mengetahui seberapa jauh tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran yang sistematis dan terencana. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diharapkan.

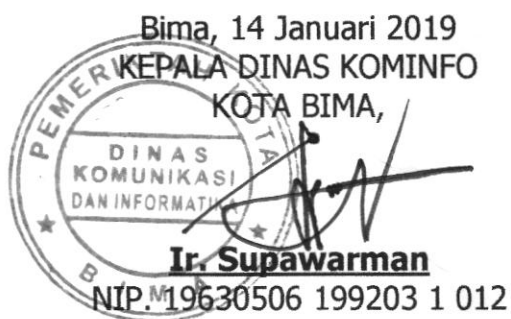
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0  
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KOMISI PERENCANAAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

110

2. Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi yang cepat, akurat dan aktual serta kualitas analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Mengembangkan fungsional perencana yang telah dimiliki oleh Diskominfo serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional perencana yang diharapkan akan dapat membawa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima menjadi institusi Komunikasi dan Informasi daerah yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
4. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima.

Bima, 14 Januari 2019  
KEPALA DINAS KOMINFO  
KOTA BIMA,  
  
**Ir. Supawarman**  
NIP. 19630506 199203 1 012